

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SEDERHANA BERDASARKAN SAK EMKM PADA P4S WANUA LAMPOKO KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE

Rahmawati¹, Zulkifli², Muh. Arafah³

mrah2745@gmail.com¹, zulkifli.bone86@gmail.com², rafhli987@gmail.com³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam

Negeri Bone Jl. Hos. Cokroaminoto, Bone

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan akuntansi sederhana berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada P4S Wanua Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone serta mengidentifikasi hambatan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola P4S Wanua Lampoko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi belum sepenuhnya sesuai dengan SAK EMKM. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan terbatas pada penerimaan serta pengeluaran kas, sehingga pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi belum diterapkan secara menyeluruh. Selain itu, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan belum disusun sesuai standar sehingga informasi keuangan belum mencerminkan kondisi lembaga secara tepat, akurat, dan transparan. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman terhadap SAK EMKM, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kurang memadainya sarana pencatatan, padatnnya kegiatan operasional, serta minimnya pelatihan dan pendampingan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan di P4S Wanua Lampoko.

Kata Kunci: Akuntansi, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah, Laporan Keuangan

Abstract:

This study aims to examine the application of simple accounting based on the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) in P4S Wanua Lampoko, Barebbo District, Bone Regency and identify obstacles to its implementation. The research uses a qualitative approach with a case study design through interviews, observations, and documentation of P4S managers of Wanua Lampoko. The results of the study show that accounting practices are not fully in accordance with SAK EMKM. Financial recording is still

carried out simply and limited to cash receipts and expenditures, so that the recognition, measurement, presentation, and disclosure of transactions have not been implemented comprehensively. In addition, financial position statements, income statements, and notes on financial statements have not been prepared according to standards so that financial information does not reflect the condition of the institution accurately, accurately, and transparently. The main obstacles include low understanding of SAK EMKM, limited competence of human resources, inadequate recording facilities, dense operational activities, and lack of training and mentoring. Therefore, it is necessary to increase the capacity of managers through continuous training and mentoring to support transparency, accountability, and sustainability of financial management at P4S Wanua Lampoko.

Keywords: Accounting, Micro, Small and Medium Entity Financial Accounting Standards, Financial Statements

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang pertanian, namun pengelolaan keuangan pada sejumlah lembaga pertanian berskala kecil masih belum dilakukan secara profesional sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Salah satu lembaga yang menghadapi kondisi tersebut adalah Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Wanua Lampoko yang terletak di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan kegiatan pertanian bagi masyarakat setempat. Data menunjukkan bahwa nilai aset agrikultur di lembaga ini mengalami peningkatan dari Rp98 juta pada tahun 2022 menjadi Rp120 juta pada tahun 2023, kemudian meningkat signifikan hingga mencapai Rp200 juta pada tahun 2024, yang mencerminkan pertumbuhan positif sektor pertanian lokal, khususnya komoditas tanaman pangan dan sayur-sayuran. Meskipun demikian, praktik pencatatan dan pelaporan keuangan yang diterapkan masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), sehingga penerapan standar tersebut diperlukan untuk meningkatkan akurasi pencatatan, memperkuat transparansi laporan keuangan, serta mendukung pengelolaan dan pengembangan agrikultur yang berkelanjutan di tingkat lokal (Maulida et al., 2024).

Akuntansi sederhana merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan penyusunan informasi keuangan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan entitas berskala mikro dan kecil. Penerapannya bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai pendapatan, beban, aset, dan kewajiban sebagai dasar pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja usaha. Meskipun menggunakan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan akuntansi pada entitas besar,

pencatatan tersebut tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.(Sitio & Juliati, 2023)

Penerapan sistem akuntansi sederhana yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan keuangan pada entitas berskala kecil, termasuk Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Wanua Lampoko yang berlokasi di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pertanian sekaligus penyelenggara kegiatan pelatihan bagi masyarakat, P4S Wanua Lampoko masih menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan terstruktur. Oleh karena itu, penerapan SAK EMKM dapat menjadi alternatif yang tepat untuk memperbaiki kualitas pencatatan transaksi keuangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik guna menunjang keberlanjutan dan pengembangan kegiatan Lembaga (Ono Tarsono, Maya Mustika, 2025).

Guna menghadapi tuntutan perkembangan dunia pertanian, P4S Wanua Lampoko perlu mengoptimalkan manajemen institusinya, termasuk aspek finansial. Manajemen keuangan yang rapi menjadi fondasi utama yang mendukung eksistensi jangka panjang serta ketercapaian tujuan dari lembaga tersebut. Akan tetapi, sebagaimana banyak entitas berskala kecil lainnya, P4S Wanua Lampoko masih menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi, serta masih rendahnya pemahaman mengenai manfaat penerapan standar akuntansi dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal, transparan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Firdayanti & Supriyati, 2023).

Kontribusi nyata dalam memodernisasi sektor pertanian ditunjukkan oleh P4S Wanua Lampoko yang berbasis di Kabupaten Bone melalui penyelenggaraan pelatihan dan praktik usaha tani. Upaya lembaga ini tidak hanya terbatas pada peningkatan kompetensi para petani, melainkan juga mencakup tata kelola berbagai modal produktif seperti lahan, tanaman, dan hasil panen yang potensial secara finansial. Besarnya potensi aset yang dimiliki menuntut adanya sistem pengelolaan dan pencatatan keuangan yang memadai agar informasi mengenai kondisi keuangan lembaga dapat disajikan secara transparan, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Meskipun memiliki potensi agrikultur yang cukup besar, sistem pencatatan keuangan yang diterapkan di P4S Wanua Lampoko hingga saat ini masih bersifat konvensional dan belum disusun berdasarkan pedoman SAK EMKM. Kondisi tersebut menyebabkan proses penilaian aset agrikultur, penghitungan biaya yang timbul selama kegiatan produksi, serta penyusunan laporan keuangan belum dapat dilakukan secara optimal, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan masih terbatas dalam menggambarkan kondisi keuangan lembaga secara tepat dan komprehensif.

Penerapan akuntansi sederhana berdasarkan ketentuan SAK EMKM telah banyak diteliti oleh akademisi, terutama dalam upaya menilai kesesuaian praktik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada entitas mikro, kecil, dan menengah.. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Amrizal Imawan, Ninik Mas'adah, Maya Safitri, 2023), yang berjudul, penerapan akuntansi berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Dwi Laundry. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM mampu membantu entitas berskala kecil dalam menyusun laporan keuangan yang lebih sistematis, informatif, dan mudah dipahami. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi yang sesuai dapat meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, sehingga mampu memperkuat tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kondisi dan kinerja keuangan entitas yang bersangkutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting karena hingga saat ini belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis tingkat kesesuaian penerapan akuntansi sederhana pada P4S Wanua Lampoko berdasarkan ketentuan SAK EMKM. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada UMKM sektor perdagangan, jasa, atau manufaktur, penelitian ini mengkaji lembaga agrikultur berbasis masyarakat yang memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda. Pengukuran kesesuaian penerapan akuntansi dilakukan dengan menggunakan indikator yang mengacu pada SAK EMKM, yaitu aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Keempat aspek tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi praktik pencatatan dan pelaporan keuangan yang diterapkan di P4S Wanua Lampoko, sehingga dapat diketahui tingkat kepatuhannya terhadap standar serta diidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan.

Penelitian yang hampir sama yang di lakukan oleh (Firdayanti & Supriyati, 2023), mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada Kelompok Tani Tanam Makmur di Mojokerto juga menunjukkan hasil yang positif. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan standar akuntansi yang sesuai mampu mendukung proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan secara lebih sistematis. Informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih terorganisasi dan mudah dipahami, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kondisi keuangan serta menetapkan kebijakan dan keputusan usaha yang lebih efektif.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Hamdani, 2024), dalam penelitiannya mengenai penerapan akuntansi berdasarkan SAK EMKM pada Toko Jaya Abadi menegaskan bahwa implementasi SAK EMKM mampu mendorong penyajian laporan keuangan yang lebih berkualitas dan informatif, sehingga kebutuhan pengguna informasi keuangan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Penerapan standar tersebut juga berperan dalam memperkuat proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi keuangan, yang pada akhirnya mendukung efektivitas pengambilan keputusan serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, penerapan SAK EMKM pada P4S Wanua Lampoko dipandang relevan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang selama ini dihadapi. Penerapan standar tersebut dapat membantu lembaga dalam melakukan penilaian aset agrikultur secara lebih terukur, menentukan biaya produksi secara tepat, serta menyusun laporan keuangan yang tersusun secara sistematis. Dengan adanya pencatatan dan pelaporan yang mengikuti ketentuan akuntansi yang berlaku, informasi keuangan yang dihasilkan diharapkan memiliki tingkat kejelasan dan keandalan yang lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengelola maupun pihak terkait sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan SAK EMKM berpotensi mendukung pengelolaan operasional yang lebih tertib, memperbaiki administrasi keuangan lembaga, serta meningkatkan kemampuan P4S Wanua Lampoko dalam mengembangkan usaha agrikultur yang berorientasi pada keberlanjutan.

Praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan di P4S Wanua Lampoko hingga saat ini masih terbatas pada pencatatan sederhana dan belum disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam SAK EMKM. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai kendala, antara lain ketidakakuratan dalam pengakuan dan penilaian aset agrikultur, kesulitan dalam mencatat hasil produksi atau panen, serta rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan yang disajikan. Apabila permasalahan ini tidak segera ditangani, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat menurun, sehingga menghambat proses evaluasi kinerja usaha, mengurangi efektivitas pengambilan keputusan manajerial, serta membatasi peluang lembaga untuk memperoleh akses terhadap sumber pendanaan dari pihak eksternal. (Sitti Murniati, Clara Neltje Meini Rotinsulu, 2025)

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajian yang menganalisis penerapan akuntansi sederhana berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada lembaga agrikultur yang bersifat nonkomersial, yaitu P4S Wanua Lampoko. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas penerapan SAK EMKM pada entitas usaha di bidang perdagangan, jasa, dan manufaktur, penelitian ini mengkaji P4S Wanua Lampoko sebagai lembaga yang memiliki karakteristik tersendiri. Lembaga tersebut tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan pertanian, tetapi juga menjalankan kegiatan usaha agrikultur yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran, praktik, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan karakteristik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai implementasi SAK EMKM pada entitas berbasis masyarakat yang bergerak di sektor pertanian. Kebaruan penelitian juga terletak pada penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi kesesuaian sistem pencatatan keuangan sederhana yang diterapkan di P4S dengan ketentuan SAK EMKM, terutama pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan.

Penelitian ini juga mengkaji berbagai kendala yang dihadapi lembaga agrikultur berbasis masyarakat dalam menerapkan standar akuntansi yang berlaku. Atas dasar tersebut, penelitian

dilakukan untuk menganalisis penerapan akuntansi sederhana berdasarkan SAK EMKM pada P4S Wanua Lampoko serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung perbaikan sistem pengelolaan keuangan lembaga. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan praktik akuntansi pada entitas berskala kecil, terutama yang bergerak di bidang pertanian dan pelatihan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan, sekaligus menambah khazanah literatur akuntansi serta menjadi bahan rujukan bagi lembaga sejenis dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dari pernyataan yang ada di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Sederhana Berdasarkan SAK EMKM Pada P4S Wanua Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan akuntansi sederhana berdasarkan SAK EMKM pada P4S Wanua Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone?
2. Apa saja kendala yang dihadapi P4S Wanua Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone dalam penerapan akuntansi sederhana berdasarkan SAK EMKM ?

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat di kemukakan menjadi dua sisi, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, studi ini diproyeksikan mampu memperkaya khazanah keilmuan di bidang akuntansi dan ekonomi, terutama mengenai implementasi SAK EMKM yang disederhanakan pada organisasi agrikultur nirlaba. Di samping itu, luaran dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan terkait adopsi standar akuntansi pada pusat pelatihan tani swadaya, sekaligus menjadi bahan rujukan bagi riset-riset akademis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memperdalam wawasan peneliti sekaligus pihak P4S Wanua Lampoko terkait adopsi akuntansi berbasis SAK EMKM. Kehadiran sistem pencatatan yang terstandarisasi ini dinilai krusial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas data keuangan, yang pada gilirannya mempermudah proses pengambilan keputusan. Hasil akhir dari studi ini juga dapat diadopsi oleh lembaga pelatihan tani lainnya sebagai instrumen evaluasi dalam membangun manajemen finansial yang berkelanjutan..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk mengkaji penerapan akuntansi sederhana berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya

(P4S) Wanua Lampoko di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola serta pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan lembaga. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder yang bersumber dari dokumen terkait pencatatan serta pelaporan keuangan P4S. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan praktik akuntansi yang diterapkan di P4S Wanua Lampoko dengan ketentuan SAK EMKM, terutama pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaiannya sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Singkat P4S Wanua Lampoko Kab. Bone

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Wanua Lampoko merupakan lembaga pelatihan pertanian yang berada di Dusun Lampoko Riattang, Desa Lampoko Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Lembaga ini didirikan dan dikelola oleh petani sebagai wadah pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan usaha agribisnis bagi masyarakat. Selain menyelenggarakan pelatihan, P4S juga mengelola usaha pertanian yang menjadi sumber pendapatan sekaligus media praktik bagi peserta pelatihan sehingga membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang baik.

Meskipun secara administratif P4S Wanua Lampoko telah memiliki struktur organisasi yang memenuhi ketentuan kelembagaan, pelaksanaan pengelolaan usaha dan keuangan sehari-hari masih terkonsentrasi pada pemilik sebagai pengelola utama. Pemilik bertanggung jawab secara langsung terhadap pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan agrikultur, penggunaan modal usaha, pencatatan keuangan yang masih bersifat sederhana, serta pengambilan berbagai keputusan yang berkaitan dengan operasional usaha. Adapun bendahara memiliki peran yang lebih terbatas, yaitu mengelola dan mempertanggungjawabkan dana bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun pihak eksternal lainnya, dengan pencatatan yang dilakukan secara terpisah dari transaksi yang berasal dari kegiatan usaha pertanian.

Kegiatan usaha pertanian yang dijalankan oleh P4S Wanua Lampoko sebagian besar didanai melalui modal pribadi pemilik. Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, lembaga ini mempekerjakan seorang karyawan tetap untuk mendukung aktivitas produksi, sedangkan pada periode panen jumlah tenaga kerja ditambah dengan memanfaatkan dua hingga tiga orang buruh harian sesuai dengan tingkat kebutuhan. Komoditas yang dibudidayakan meliputi berbagai jenis tanaman hortikultura dan tanaman pangan yang selain memiliki nilai ekonomi sebagai sumber pendapatan, juga dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dan praktik bagi petani dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan di bidang pertanian.

P4S Wanua Lampoko berfungsi sebagai pusat pelatihan dan unit percontohan agrikultur yang secara aktif menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait komoditas pertanian yang berpotensi dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Kegiatan tersebut mencakup pemberian pengetahuan mengenai teknik budidaya, pengaturan pola tanam, pemanfaatan sarana produksi, serta penerapan praktik pertanian yang efisien berdasarkan pengalaman dan hasil pengelolaan usaha yang telah dilakukan secara langsung. Melalui peran tersebut, P4S Wanua Lampoko tidak hanya menjadi sarana pendidikan dan pelatihan pertanian, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung kegiatan produksi serta pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani.

Penerapan Akuntansi Sederhana Berdasarkan SAK EMKM pada P4S Wanua Lampoko

Sebagai sebuah sistem terintegrasi, akuntansi berfungsi dalam mengidentifikasi, membukukan, mengklasifikasikan, hingga menyajikan data transaksi finansial guna membantu berbagai pemangku kepentingan mengambil keputusan strategis. Di tingkat usaha mikro dan kecil, dokumentasi keuangan umumnya masih bersifat elementer dan berpusat pada perputaran arus kas masuk serta keluar. Padahal, merujuk pada regulasi SAK EMKM, laporan keuangan standar bagi entitas setidaknya wajib memuat tiga komponen: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan (CALK). Dalam proses penyusunannya, pelaporan tersebut harus mengintegrasikan empat pilar utama, yakni pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas informasi keuangan yang disajikan. (Handaya & Patricia, 2016)

Untuk memperoleh gambaran yang lebih sistematis, analisis dilakukan berdasarkan empat aspek utama dalam SAK EMKM, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Aspek Pengakuan

Aspek pengakuan dalam SAK EMKM mengatur bahwa transaksi diakui apabila memberikan manfaat ekonomi dan dapat diukur secara andal, mencakup penerimaan dan pengeluaran kas serta hak dan kewajiban yang timbul.

Praktik sistem pencatatan keuangan yang diterapkan di P4S Wanua Lampoko masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Pencatatan transaksi lebih difokuskan pada arus kas masuk dan arus kas keluar, sementara transaksi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha belum didokumentasikan secara lengkap. Pengelolaan keuangan juga belum dilakukan secara terpadu karena bendahara hanya menangani pencatatan dana bantuan yang diperoleh dari pemerintah atau pihak eksternal, sedangkan penerimaan yang berasal dari kegiatan usaha pertanian dikelola dan dicatat secara langsung oleh pemilik. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa sistem administrasi keuangan yang diterapkan masih belum mampu menyediakan informasi keuangan yang utuh, sehingga upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan masih diperlukan. Ketua P4S Wanua Lampoko, (Awal Anda Rezki, 2025) menyatakan bahwa pencatatan dilakukan secara sederhana melalui telepon genggam untuk mencatat hasil penjualan panen maupun pengeluaran seperti

pembelian pupuk dan bibit, tanpa adanya pembukuan atau laporan keuangan yang lengkap. Sementara itu, Bendahara, (Ika Febriani, 2025), menjelaskan bahwa pendapatan dari usaha pertanian tidak dikelolanya karena merupakan usaha pribadi pemilik, sedangkan tugasnya hanya mengelola dana bantuan pemerintah. Dana bantuan tersebut digunakan untuk membeli bibit atau peralatan, dan bentuk pertanggungjawaban hanya berupa nota pembelian tanpa penyusunan laporan keuangan secara sistematis.

Berdasarkan temuan ini, praktik pengakuan transaksi keuangan di P4S Wanua Lampoko masih menggunakan dasar kas (*cash basis*), yaitu transaksi hanya dicatat pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas tanpa melakukan pengakuan terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas sebagaimana yang diatur dalam SAK EMKM. Pencatatan transaksi yang dilakukan secara pribadi melalui telepon genggam serta tidak menggunakan format pembukuan yang baku mengindikasikan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan belum tersusun secara sistematis. Selain itu, belum adanya pemisahan yang tegas antara keuangan usaha dan keuangan pribadi, serta tidak diintegrasikannya dana bantuan pemerintah ke dalam pembukuan usaha, menunjukkan bahwa penerapan prinsip entitas ekonomi dan prinsip pengakuan transaksi berdasarkan SAK EMKM masih belum dilaksanakan secara optimal.

Menurut SAK EMKM, suatu unsur laporan keuangan diakui apabila memiliki manfaat ekonomi di masa depan dan dapat diukur secara andal, serta mencakup aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Oleh karena itu, praktik pengakuan di P4S Wanua Lampoko belum sesuai dengan ketentuan SAK EMKM karena masih terbatas pada pencatatan kas dan belum mampu menggambarkan kondisi keuangan lembaga secara menyeluruh.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh, (Sitio & Juliati, 2023), yang menyebutkan bahwa mayoritas UMKM belum memaksimalkan sistem akuntansi mereka akibat pencatatan yang terbatas, P4S Wanua Lampoko juga menghadapi kendala yang sama. Administrasi keuangan di pusat pelatihan ini masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya mematuhi struktur pelaporan keuangan standarisasi yang diatur oleh SAK EMKM.

Aspek Pengukuran

Dalam SAK EMKM, aspek pengukuran menekankan penilaian setiap transaksi berdasarkan nilai yang dapat diukur secara andal. (Risma M. Siregar, Arie F. Kawulur, 2021) Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran di P4S Wanua Lampoko masih terbatas pada pencatatan nominal kas masuk dan kas keluar, tanpa memperhitungkan unsur ekonomi lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Ketua P4S Wanua Lampoko (Awal Anda Rezki, 2025), menjelaskan bahwa nilai transaksi hanya dicatat berdasarkan uang yang diterima dan dikeluarkan tanpa

perhitungan lain. Selain itu, aset seperti peralatan pertanian tidak pernah dinilai maupun dihitung penyusutannya karena hanya dianggap sebagai sarana operasional. Persediaan hasil panen juga tidak dicatat sebagai persediaan akhir, melainkan langsung dianggap sebagai hasil penjualan. Sementara itu, dana bantuan pemerintah langsung digunakan untuk membeli bibit atau peralatan, dan pertanggungjawabannya hanya berupa nota pembelian tanpa pencatatan dalam laporan keuangan. Pengelola juga belum menghitung laba atau rugi secara sistematis, tetapi hanya berdasarkan selisih kas masuk dan kas keluar.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pengukuran keuangan di P4S Wanua Lampoko masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan SAK EMKM. Pengukuran transaksi keuangan masih difokuskan pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tanpa melakukan penilaian terhadap aset, persediaan, maupun penyusutan aset tetap. Selain itu, perhitungan laba usaha belum mempertimbangkan seluruh biaya dan beban yang timbul selama kegiatan operasional berlangsung. Keadaan tersebut mengakibatkan informasi keuangan yang disajikan belum dapat mencerminkan kondisi serta kinerja keuangan lembaga secara menyeluruh. Keterbatasan tersebut menyebabkan laporan keuangan yang tersedia belum mampu menyediakan informasi yang memadai, berkualitas, dan dapat dipercaya untuk mendukung kegiatan evaluasi usaha, perencanaan, maupun proses pengambilan keputusan oleh pihak pengelola.

Dalam teori akuntansi, pengukuran tidak hanya mencakup pencatatan kas, tetapi juga penilaian aset, kewajiban, pendapatan, dan beban berdasarkan prinsip biaya historis (*historical cost*) serta pengakuan beban sesuai prinsip penandingan (*matching principle*). Oleh karena itu, praktik pengukuran di P4S Wanua Lampoko masih menunjukkan kesenjangan dengan ketentuan tersebut karena belum melakukan penilaian aset, penyusutan, pencatatan persediaan, maupun pengukuran laba secara sistematis.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh, (Surachman, 2023), yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai akuntansi mendorong pelaku UMKM untuk melakukan pengukuran transaksi keuangan hanya berdasarkan arus kas yang terjadi, tanpa mempertimbangkan unsur-unsur keuangan lainnya. Kondisi yang ditemukan di P4S Wanua Lampoko juga memperlihatkan kecenderungan yang sama, di mana praktik pengukuran keuangan masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM. Meskipun demikian, pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan sebagai langkah awal dalam pengembangan sistem pengukuran keuangan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Aspek Penyajian

Aspek penyajian dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan secara sistematis agar informasi yang dihasilkan mudah dipahami dan bermanfaat dalam menilai kinerja serta kondisi keuangan entitas. (Immu Puteri Sari, Fitri Yulianis, 2022)

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian laporan keuangan di P4S Wanua Lampoko masih terbatas pada pencatatan sederhana atas penerimaan dan pengeluaran kas. Lembaga belum menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan SAK EMKM, seperti laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyajian informasi keuangan belum dilakukan secara sistematis dan belum memenuhi standar penyajian yang berlaku. Ketua P4S Wanua Lampoko, (Awal Anda Rezki, 2025) menjelaskan bahwa pencatatan keuangan hanya berupa sebagian pemasukan dan pengeluaran yang dicatat melalui telepon genggam tanpa format baku, sehingga tidak pernah disusun menjadi laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Sementara itu, Bendahara, (Ika Febriani, 2025) menyatakan bahwa pengelolaan dana bantuan pemerintah hanya dipertanggungjawabkan melalui nota pembelian tanpa penyusunan laporan keuangan secara formal.

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian laporan keuangan pada P4S Wanua Lampoko masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip akuntansi maupun ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM. Informasi keuangan yang tersedia masih terbatas pada pencatatan arus kas masuk dan arus kas keluar, sehingga belum mampu menyajikan gambaran yang utuh mengenai posisi aset, liabilitas, ekuitas, serta hasil kegiatan operasional lembaga. Selain itu, pencatatan transaksi yang dilakukan melalui telepon genggam tanpa menggunakan format pembukuan yang terstandarisasi menunjukkan bahwa informasi keuangan yang disajikan belum memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, seperti keterandalan, keterbandingan, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem pelaporan keuangan di P4S Wanua Lampoko masih memerlukan penyempurnaan agar dapat menghasilkan informasi yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi pengelola maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

SAK EMKM mengatur bahwa entitas sekurang-kurangnya menyusun tiga komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan tersebut harus dilakukan secara terstruktur, berkesinambungan antarperiode, dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami agar informasi keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pengguna laporan keuangan. Namun, praktik di P4S Wanua Lampoko belum memenuhi ketentuan tersebut karena belum menyusun laporan keuangan sesuai standar dan masih terbatas pada pencatatan kas sederhana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik penyajian keuangan di P4S Wanua Lampoko dengan ketentuan SAK EMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian, (Hositania, Carolyn Lukita, 2024) yang menjelaskan bahwa sebagian besar UMKM masih melakukan pencatatan sederhana tanpa menyusun laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Kondisi tersebut serupa dengan P4S Wanua Lampoko, di mana belum adanya laporan keuangan yang sistematis menyebabkan pengelola kesulitan mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan lembaga secara periodik.

Aspek Pengungkapan

Aspek pengungkapan dalam akuntansi berkaitan dengan penyampaian informasi yang melengkapi laporan keuangan agar mudah dipahami, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa angka, tetapi juga mencakup kebijakan akuntansi, metode pencatatan, dan informasi lain yang relevan mengenai kondisi keuangan entitas. (Sri Ayem, Fuadhillah Kirana Putri, Desi Fitriani Arang, Fina Cholifiana, Helen Rambu Laja Kodi R. Langu, Tiara Pratama Putri, 2024)

Berdasarkan hasil penelitian, pengungkapan informasi keuangan di P4S Wanua Lampoko masih sangat terbatas. Pengelola hanya mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran tanpa disertai informasi yang menjelaskan secara rinci transaksi maupun kondisi keuangan lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pengungkapan belum memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kelengkapan sebagaimana diatur dalam SAK EMKM. Ketua P4S Wanua Lampoko, (Awal Anda Rezki, 2025) menyatakan bahwa informasi keuangan yang dimiliki hanya sebatas jumlah pemasukan dan pengeluaran tanpa penjelasan yang lebih rinci. Senada dengan itu, Bendahara, (Ika Febriani, 2025) menjelaskan bahwa pengelolaan dana bantuan pemerintah hanya dipertanggungjawabkan melalui bukti pembelian (nota) tanpa disertai laporan keuangan maupun catatan penjelas.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengungkapan informasi keuangan di P4S Wanua Lampoko masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pengelola belum menyajikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, prosedur pencatatan transaksi, rincian aset yang dimiliki, maupun penggunaan dana secara lengkap dan terstruktur. Kondisi tersebut menyebabkan informasi keuangan yang tersedia belum memiliki tingkat transparansi yang memadai, relatif sulit dipahami oleh pengguna laporan, serta belum mampu merepresentasikan kondisi keuangan lembaga secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan di P4S Wanua Lampoko belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dalam teori *Stewardship*, yang menempatkan pengelola sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam kerangka teori tersebut, penyajian informasi keuangan yang memadai dan komprehensif merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelola atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Akan tetapi, praktik yang diterapkan di P4S Wanua Lampoko masih terbatas pada penyimpanan dan penyajian bukti-bukti transaksi, sehingga fungsi akuntabilitas sebagai bagian penting dari pengelolaan keuangan belum dapat diwujudkan secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian, (Suhaila Tatik & Ikhyannuddin, 2024) yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum menerapkan pengungkapan sesuai SAK EMKM karena keterbatasan pemahaman akuntansi dan belum tersedianya sistem pencatatan yang memadai. Berbeda dengan ketentuan tersebut, P4S Wanua Lampoko belum memiliki catatan atas

laporan keuangan dan pengungkapan penggunaan dana bantuan masih terbatas pada nota pembelian.

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, dapat diketahui bahwa praktik akuntansi yang diterapkan di P4S Wanua Lampoko masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas pengelola dalam bidang akuntansi serta perbaikan sistem penyusunan laporan keuangan agar proses pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Dengan demikian, informasi keuangan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan lembaga, memiliki tingkat transparansi yang lebih baik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kendala dalam Penerapan Akuntansi Sederhana Berdasarkan SAK EMKM

Penerapan akuntansi sederhana pada entitas berskala mikro dan kecil masih dihadapkan pada berbagai hambatan, terutama keterbatasan kompetensi sumber daya manusia serta rendahnya tingkat pemahaman mengenai akuntansi. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM belum mampu mengimplementasikan SAK EMKM secara maksimal dan masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku (Beatrix Yunarti Manchut, 2022).

Kurangnya Pemahaman terhadap SAK EMKM

Kurangnya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan akuntansi di P4S Wanua Lampoko. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelola belum mengenal SAK EMKM dan belum pernah mengikuti sosialisasi maupun pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan. Ketua P4S Wanua Lampoko, (Awal Anda Rezki, 2025) menyatakan bahwa baru mengetahui SAK EMKM dari peneliti, sedangkan Bendahara, (Ika Febriani, 2025) mengungkapkan bahwa mereka belum pernah memperoleh pelatihan mengenai pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi.

Keadaan tersebut menyebabkan praktik pencatatan keuangan di P4S Wanua Lampoko masih berfokus pada pencatatan arus kas masuk dan arus kas keluar tanpa didukung oleh klasifikasi akun yang memadai maupun penyusunan laporan keuangan yang tersusun secara sistematis. Rendahnya pemahaman pengelola terhadap konsep akuntansi juga berdampak pada belum optimalnya penerapan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagaimana diatur dalam SAK EMKM. Akibatnya, informasi keuangan yang dihasilkan belum dapat merepresentasikan posisi keuangan dan kinerja lembaga secara komprehensif, sehingga pemanfaatannya sebagai dasar untuk melakukan evaluasi, menyusun perencanaan, dan menetapkan keputusan terkait pengelolaan usaha masih terbatas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian, (Caroline Winda Meylani, 2022) yang mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman akuntansi menjadikan salah satu faktor utama yang

menghambat dari penerapan SAK EMKM pada UMKM. Kondisi tersebut juga terlihat pada P4S Wanua Lampoko, di mana keterbatasan pengetahuan dan belum adanya pelatihan menyebabkan pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan belum sesuai dengan standar yang berlaku.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kendala dalam penerapan akuntansi sederhana di P4S Wanua Lampoko. Berdasarkan hasil wawancara, tidak terdapat tenaga yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sehingga seluruh pencatatan keuangan dilakukan secara mandiri sesuai kemampuan pengelola. Selain itu, bendahara hanya bertanggung jawab mengelola dana bantuan pemerintah, sedangkan pencatatan pendapatan usaha dilakukan oleh ketua secara terpisah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan belum dilakukan secara terintegrasi. Ketua P4S Wanua Lampoko, (Awal Anda Rezki, 2025) juga mengakui bahwa pengelola masih belum memahami penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bendahara, (Ika Febriani, 2025) yang menyampaikan bahwa belum pernah ada pelatihan atau pendampingan mengenai akuntansi. Akibatnya, pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia di P4S Wanua Lampoko tidak hanya terlihat dari jumlah tenaga kerja yang tersedia, tetapi juga dari masih rendahnya kompetensi dalam bidang akuntansi. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pengelolaan keuangan, rendahnya kualitas informasi keuangan yang dihasilkan, serta belum terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam SAK EMKM. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan di bidang akuntansi perlu dilakukan sebagai langkah strategis untuk mendukung penerapan SAK EMKM secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan hasil studi, (Krisnayanti & Masdiantini, 2025) yang mengungkapkan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi SAK EMKM pada UMKM. Kurangnya pemahaman di bidang akuntansi serta terbatasnya kegiatan pelatihan menyebabkan praktik pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kondisi yang serupa juga ditemukan pada P4S Wanua Lampoko, sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan keterbatasan SDM masih menjadi tantangan umum dalam penerapan akuntansi pada entitas berskala mikro.

Keterbatasan Sarana dan Alat Pencatatan

Keterbatasan sarana dan alat pencatatan memiliki salah satu kendala penerapan akuntansi sederhana di P4S Wanua Lampoko. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pencatatan transaksi masih dilakukan secara sederhana menggunakan telepon genggam dan catatan pribadi, tanpa didukung buku kas, jurnal, maupun aplikasi akuntansi. Ketua P4S Wanua Lampoko, (Awal Anda Rezki, 2025) menyatakan bahwa pencatatan hanya dilakukan agar tidak lupa terhadap pemasukan dan pengeluaran, sedangkan Bendahara, (Ika Febriani, 2025) menjelaskan bahwa belum ada format pencatatan yang sesuai dengan standar - standar akuntansi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan belum terstruktur sehingga menyulitkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Keterbatasan sarana ini juga berdampak pada kurang lengkapnya informasi keuangan serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, minimnya pemanfaatan teknologi dan belum tersedianya media pembukuan yang memadai menjadi faktor yang menghambat penerapan akuntansi secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian, (Masyita Salshabilla Manuji, La ode sukila la ode beda, Ayu dewanti, Pierre B.A Manuputty, 2026) yang menyatakan bahwa keterbatasan sarana pencatatan, seperti tidak tersedianya buku kas, jurnal, maupun aplikasi akuntansi, menyebabkan pelaku UMKM masih melakukan pencatatan secara manual dan sederhana sehingga laporan keuangan belum tersusun sesuai standar. Kondisi tersebut juga ditemukan pada P4S Wanua Lampoko, yang hingga saat ini masih menggunakan pencatatan sederhana tanpa didukung sistem pembukuan yang memadai sesuai SAK EMKM.

Kesibukan Operasional dan Kurangnya Waktu

Kesibukan operasional menjadi salah satu kendala dalam penerapan akuntansi sederhana di P4S Wanua Lampoko. Aktivitas utama pengelola yang berfokus pada kegiatan pertanian dan pelatihan menyebabkan pencatatan keuangan belum menjadi prioritas dan sering dilakukan hanya ketika terdapat waktu luang. Ketua P4S Wanua Lampoko, (Awal Anda Rezki, 2025) menyampaikan bahwa pencatatan keuangan dilakukan setelah kegiatan operasional selesai, sedangkan Bendahara, (Ika Febriani, 2025) menjelaskan bahwa pencatatan sering tertunda dan umumnya dilakukan saat diperlukan untuk pertanggungjawaban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara rutin sesuai dengan prinsip SAK EMKM. Akibatnya, penyusunan laporan keuangan menjadi kurang sistematis, sehingga berpotensi mengurangi akurasi, transparansi, dan akuntabilitas informasi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tugas yang lebih jelas serta penjadwalan pencatatan keuangan secara berkala agar administrasi keuangan dapat berjalan lebih efektif.

Temuan ini berhubungan dengan penelitian, (Ilmi et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa tingginya beban kerja dan aktivitas operasional dapat menghambat pelaksanaan tugas

administratif, termasuk pencatatan dan pelaporan keuangan. Kondisi tersebut juga terjadi pada P4S Wanua Lampoko, di mana fokus pengelola pada kegiatan pertanian dan pelatihan menyebabkan pencatatan keuangan belum dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan SAK EMKM.

Minimnya Pelatihan dan Pendampingan

Keterbatasan kegiatan pelatihan dan pendampingan menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan akuntansi sederhana berbasis SAK EMKM di P4S Wanua Lampoko. Berdasarkan hasil wawancara, pengelola menyatakan bahwa mereka belum pernah memperoleh sosialisasi maupun pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan. Akibatnya, proses pencatatan keuangan dilakukan berdasarkan pemahaman masing-masing individu tanpa mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, Ketua P4S Wanua Lampoko, (Awal Anda Rezki, 2025) menyampaikan bahwa selama ini belum pernah ada pelatihan mengenai SAK EMKM, sedangkan Bendahara, (Ika Febriani, 2025) menyatakan bahwa pendampingan akuntansi akan sangat membantu dalam menyusun laporan keuangan yang lebih baik.

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat di nilai bahwa minimnya pelatihan dan pendampingan merupakan faktor penting yang menghambat penerapan akuntansi sederhana di P4S Wanua Lampoko. Tanpa adanya bimbingan teknis dan sosialisasi yang memadai, pengelola mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar akuntansi, termasuk aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagaimana diatur dalam SAK EMKM. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam penyusunan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian, (Safaruddin, Rachmiani, 2026) yang menyatakan bahwa pelatihan akuntansi dan pendampingan berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku – pelaku UMKM terhadap SAK EMKM serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kondisi tersebut juga terjadi pada P4S Wanua Lampoko, sehingga dukungan dari pemerintah, akademisi, dan organisasi profesi diperlukan untuk memperkuat kompetensi pengelola dalam menerapkan akuntansi sesuai standar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada pembahasan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan secara keseluruhan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sederhana berbasis SAK EMKM pada P4S Wanua Lampoko masih belum terlaksana secara optimal. Ketidaksesuaian tersebut terlihat pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan standar. Praktik pencatatan keuangan masih berfokus pada arus kas masuk dan arus kas keluar, belum mencakup keseluruhan komponen laporan keuangan, serta belum terdapat pemisahan yang jelas antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Di samping itu, pengukuran aset, penyusunan laporan keuangan secara terstruktur, serta

pengungkapan informasi keuangan yang memadai juga belum dilakukan. Hambatan yang dihadapi meliputi terbatasnya pemahaman terhadap SAK EMKM, keterbatasan sumber daya manusia, penggunaan sarana pencatatan yang masih sederhana, padatnya aktivitas operasional, serta minimnya pelatihan dan pendampingan. Jika ditinjau dari perspektif Teori Stewardship, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pengelolaan belum diterapkan secara maksimal dalam pengelolaan keuangan lembaga.

Saran

Bagi Pengelola P4S Wanua Lampoko

Pengelola disarankan menerapkan pencatatan keuangan yang lebih sistematis sesuai SAK EMKM, melakukan pemisahan antara keuangan usaha dan pribadi, serta menyusun laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Penggunaan buku kas atau aplikasi pencatatan keuangan juga dianjurkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada P4S atau UMKM lain dengan karakteristik berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan SAK EMKM beserta kendala yang dihadapi.

Implikasi

Implikasi bagi P4S Wanua Lampoko

Penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan akuntansi sederhana berbasis SAK EMKM dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Pencatatan yang sistematis akan memudahkan pengelola mengetahui kondisi keuangan, mengevaluasi kinerja usaha, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Implikasi Secara Umum

Hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan akuntansi berbasis SAK EMKM berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan entitas mikro. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi akuntansi melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat, transparan, dan mampu mendukung keberlanjutan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal Imawan, Ninik Mas'adah, Maya Safitri, F. A. F. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Dwi Laundry. *Sustainable Jurnal Akuntansi*, 3(2), h. 282–300.
- Beatrix Yunarti Manehat, F. O. S. (2022). Meninjau Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Di Indonesia Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 10(1), h. 2–11.
- Caroline Winda Meylani, I. (2022). Pengaruh Persepsi Owner , Pemahaman , Pengetahuan dan

- Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM di Beteng Trade Center (BTC) Solo. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, X(1), h. 12–22.
- Firdayanti, B. C., & Supriyati, S. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan berdasar SAK EMKM pada Kelompok Tani Tanam Makmur Mojokerto. *Jurnal Abdimas PHS*, 6(3), h. 730–739.
- Hamdani. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK EMKM Pada Toko Jaya Abadi. *Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dan Riset Ilmu Sosial 2024*, 7(2), h. 123–129.
- Handaya, D. P. D. S., & Patricia. (2016). *Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Hositania, Carolyn Lukita, T. A. (2024). Implementation of sak emkm in the quality of umkm financial statements (case study on umkm boutique roem store). *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7, h. 2433–2442.
- Ilmi, M., Ariani, L., & Quarta, D. L. (2024). Pengaruh Beban Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Banjarmasin. *Jurnal Psikologi*, 4, 1–13.
- Immu Puteri Sari, Fitri Yulianis, R. P. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Sak Emkm Pada Usaha Karak Kaling Marisa. *Menara Ekonomi*, VIII(3), h. 324–338.
- Krisnayanti, K., & Masdiantini, P. R. (2025). Pengaruh Kualitas SDM , Pemahaman Akuntansi , Ukuran Usaha , dan Sosialisasi SAK EMKM terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 15(1), h. 32–46.
- Masyita Salshabilla Manuji, La ode sukila la ode beda, Ayu dewanti, Pierre B.A Manuputty, F. T. B. (2026). Analisis Keterbatasan Pencatatan Laporan Keuangan UMKM dan Upaya Perbaikannya. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), h. 12087–12093.
- Maulida, D. N., Leniwati, D., Juanda, A., & Haryanti, A. D. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Menurut Psak 69 Dengan Pendekatan Nilai Wajar. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(5), h. 3071–3077.
- Ono Tarsono, Maya Mustika, nayah N. F. (2025). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Penyajian Laporan Keuangan. *Journal of Economic and Economic Policy*, 11(2), h. 85–96.
- Risma M. Siregar, Arie F. Kawulur, F. O. M. (2021). Analisis Pengukuran Dan Pengakuan Akuntansi Persediaan Berdasarkan Psak No . 14 Pada Toko Blessing ' S. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(1), h. 41–50.
- Safaruddin, Rachmiani, E. A. M. (2026). *Perencanaan Keuangan Sebagai Penutup Kesejahteraan Finansial Keluarga Di Era Digital: Sebuah Systematic Literature Review*. 9, h. 378–392.
- Sitio, S. S., & Juliati, Y. S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi

- Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dan Kegunaan Informasi Akuntansi Siti Salma Sitio mengesahkan SAK- EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Ekonomi Mikro Kecil. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), h. 267–277.
- Sitti Murniati, Clara Neltje Meini Rotinsulu, H. (2025). *Keputusan Keuangan* (T. Yuwanda (ed.)). Takaza Innovatix Labs.
- Sri Ayem, Fuadhillah Kirana Putri, Desi Fitriani Arang, Fina Cholifiana, Helen Rambu Laja Kodi R. Langu, Tiara Pratama Putri, V. S. (2024). Systematic Literature Review : Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (Sak-Emkm) Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Indonesia. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(2), h. 87–99.
- Suhaila Tatik, M., & Ikhyannuddin, R. G. P. R. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi SAK UMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus UMKM Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 3(1), h. 135–144.
- Surachman. (2023). Pengukuran Tingkat Pemahaman Dan Implementasi Sak Emkm Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 3(3), h. 506–516.